

ABSTRAK

Nama : Sutyono
Program Studi : Kriminologi
Judul : Keseuaian Perda Tibum Dengan Implementasinya
Dalam Penertiban Pelacuran Jalanan
(Studi Kasus Penertiban Pelacuran Jalanan di Jakarta)

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini seputar keseuaian Perda Tibum dengan implementasinya dalam penertiban pelacuran di Jakarta oleh aparat terkait dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan.

Atas permasalahan tersebut yang ingin diketahui yakni: Bagaimana pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta terhadap pelacur jalanan yang cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan?, Bagaimana kesesuaian antara Perda Tibum dengan implementasi Perda Tibum tersebut di lapangan?, dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi Perda Tibum di Jakarta saat penertiban pelacuran jalanan, cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan alur pikir dalam tesis ini adalah teori yang berspektif feminis yang sangat erat kaitannya dengan tema yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya seputar keseuaian Perda Tibum dengan implementasinya di lapangan saat menertibkan pelacuran jalanan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa antara amanat Perda Tibum dengan implementasi di lapangan saat menertibkan pelacuran jalanan cenderung diskriminasi atau merugikan perempuan. Bila mengacu pada Perda Tibum, penertiban pelacuran jalanan tidak boleh diskriminasi, siapapun yang melanggar ketertiban umum harus ditertibkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran atau rekomendasi, bahwa dalam menertibkan pelacuran jalanan seharusnya aparat harus mengacu pada amanat Perda Tibum itu sendiri. Penertiban pelacuran jalanan tidak boleh diskriminasi. Selain itu, dalam menertibkan pelacuran jalanan, seharusnya aparat tidak langsung menangkapi perempuan yang berada di jalan, tetapi harus diyakini dulu bahwa mereka adalah benar pelacur jalanan. Caranya antara lain mengubah cara menertibkan dengan pola yang sekarang ini dengan melakukan penyamaran, misalnya, aparat berpura-pura menjadi pelanggan atau pria hidung belang sehingga tidak akan terjadi salah tangkap.

Kata kunci:

Perda Tibum, implementasi, pelacuran jalanan, diskriminasi

ABSTRACT

Name : Sutyono
Study Program : Criminology
Title : The suitability of Local Regulations of Public Order with Its Implementation in Ordering Street Prostitution (Case Study Ordering Street Prostitution in Jakarta)

Issue raised in this thesis is about the suitability of local regulation of public order (PERDA TIBUM) with its implementation in ordering street prostitution in Jakarta by related officials of Provincial Government of DKI Jakarta which tends to discriminate or disadvantage women.

For this issue that we want to know i.e.: how the implementation of local regulations of public order in Jakarta toward ordering street prostitution in Jakarta which tends to discriminate or disadvantage women? How the suitability between local regulations of public order and its implementation on the field? And what factors lead to the implementation of local regulations of public order in Jakarta tends to discriminate or disadvantage women.

Theory used to explain the flow of thought in this thesis is feminist theory which is closely related to the themes raised. Method used in this research is descriptive qualitative, this method can give a clearer picture and obtain broad information about the suitability of local regulation of public order with its implementation on the field when ordering street prostitution.

The result indicates that between the mandate of local regulations of public order and its implementation when ordering street prostitution is not suitable. Fact about implementation on the field when ordering street prostitution tends to discriminate or disadvantage women. When referring to local regulations of public order, ordering street prostitution should not discriminate, anyone who violates the public order should be disciplined.

Based on the result, the author provides suggestions or recommendations, that in ordering street prostitution, the officers should refer to the mandate of local regulations of public order itself. Regulating street prostitution should not be discrimination. Besides, in ordering the street prostitution, the authorities should not arrest the woman directly in the path, but it must be believed that they are true street prostitutes. Way to change ordering pattern for example, officers pretend to be customers or man masher so that there will be no one to be false arrested.

Keywords:

Local regulations of public order, implementation, street prostitution, discrimination